

BAB IV

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan mengenai kepentingan China di Kamerun dalam proyek Belt and Road Initiatives (BRI), maka peneliti menemukan terdapat kepentingan nasional yang ingin dicapai China dengan memberi bantuan dan utang pembangunan infrastruktur di Kamerun sejak tahun 2008. Hal ini dibuktikan oleh teori kepentingan nasional Plano & Olton yang mengindikasikan bahwa setiap kebijakan negara itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial negara itu sendiri. Dalam hal ini, kebutuhan esensial yang ingin dicapai China adalah kebutuhan ekonomi yang mencakup 1) keinginan China memproduksi perusahaan milik negara agar menyumbang profit ke negara dan 2) China ingin meningkatkan perdagangan bilateral dengan Kamerun.

4.1. Perusahaan Milik Negara Bekerja secara Produktif dan Menyumbang Profit untuk Negara

Kepentingan ekonomi yang pertama adalah kepentingan China untuk mengalihkan sumber daya modal dan manusia yang tidak digunakan secara optimal. Dengan adanya proyek-proyek infrastruktur di Kamerun, China dapat mengalihkan sumber daya ini ke arah yang produktif. Peningkatan infrastruktur di negara-negara berkembang, tidak hanya China tetapi juga negara-negara lainnya akan mendapatkan manfaat melalui ekspansi perdagangan. Dari adanya program ini, China sekaligus bisa mencapai kepentingan politik strategisnya karena China memperoleh sekutu serta pengaruh melalui proyek-proyek ini (Dollar, 2019).

Bukti dari kepentingan ekonomi China adalah program BRI secara signifikan mewajibkan pemanfaatan sumber daya perusahaan dan tenaga kerja asal China langsung. Proyek-proyek ini didanai melalui skema pinjaman yang kemudian harus dikembalikan oleh negara peminjam. Penting untuk dicatat bahwa pelibatan ini sering kali muncul dari

kebutuhan atau rencana yang menunjukkan arah menuju kepemilikan langsung oleh China terhadap infrastruktur di negara peminjam. Sebagai contoh nyata, laporan dari Pusat Studi Strategis baru-baru ini mengungkapkan bahwa sekitar 90% dari seluruh proyek yang tergabung dalam proyek BRI ini sedang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan China (Hart-Landsberg, 2018). Hal ini tentu memberi keuntungan yang banyak untuk China karena perusahaan-perusahaan tersebut bisa terus terjaga dan beroperasi di tengah kondisinya yang tidak efisien ketika hanya tinggal di negaranya.

Dalam kerangka proyek BRI di Afrika, perusahaan milik negara China yang beroperasi di luar negeri telah beralih menuju keterlibatan jangka panjang China sebagai manajer dan pemangku kepentingan utama dalam mengoperasikan dan mengelola proyek-proyek tersebut (Martin Hart-Landsberg, 2018). Sebagai contoh, China Merchants Holding, mereka dulu hanya bertanggung jawab atas pembangunan pelabuhan serbaguna dan kompleks zona industri di Djibouti, kini telah berperan sebagai pemangku kepentingan dalam manajemen dan pengoperasian zona tersebut. Mereka membentuk sebuah konsorsium bersama otoritas pelabuhan Djibouti untuk mengelola zona tersebut selama periode sepuluh tahun. Hal serupa juga terjadi dalam proyek Pelabuhan Kribi di Kamerun. Perusahaan konstruksi yang memegang proyek tersebut, China Harbor Engineering Company Ltd., mengkoordinator proyek termasuk untuk urusan administrasi dan manajemen proyek. Tidak hanya itu, China Harbor Engineering Company juga menerapkan budaya kerja ala China untuk orang-orang yang bekerja di proyek tersebut (Xinhua, 2018). China Harbor Engineering Company juga membentuk konsorsium Bersama perusahaan Prancis sebagai tim proyek di Kamerun.

Dengan demikian, model ini mencerminkan transformasi strategis yang terjadi dalam partisipasi perusahaan China di proyek-proyek BRI, di mana mereka mengambil peran lebih aktif dan berkelanjutan dalam pengelolaan proyek serta turut ambil bagian dalam aspek-aspek penting

dari pembangunan dan operasi proyek tersebut. Strategi China ini sekaligus menyerap surplus modal yang dimiliki dan meningkatkan margin keuntungan perusahaan-perusahaan konstruksi yang bekerja di negara peminjam termasuk Kamerun. Perusahaan milik pemerintah China yang diklasifikasikan sebagai kelas komersial digerakkan untuk mencari keuntungan dan pengaruh di luar negeri termasuk dalam proyek BRI. Beberapa tahun belakangan, perusahaan negara ini terbukti berperan secara dominan dalam memberi keuntungan ekonomi untuk negara (Leutert, 2016).

Argumen dan bukti di atas mendukung teori kepentingan nasional Plano & Olton bahwa ketika sebuah negara menjalankan strategi politik luar negerinya, tujuan utamanya adalah untuk mencapai berbagai kebutuhan sensial negara, termasuk aspek keamanan nasional, pertumbuhan ekonomi, menjaga harga diri negara, melindungi serta mengembangkan teknologi, serta mengatur penggunaan kekuatan dan sistem pertahanan diri. Dalam kasus ini, China berarti ingin mencapai kebutuhan esensialnya yaitu kebutuhan ekonomi. Ketika perusahaan milik negara itu bisa beroperasi secara produktif di luar negeri, maka itu akan berpengaruh pada keuntungan dan perputaran modal perusahaan tersebut. Pada akhirnya, keuntungan yang diperoleh perusahaan konstruksi milik negara China seperti China Harbor Engineering Company ini akan mengalir lagi ke negara.

Sebagaimana temuan di atas, China mengalami surplus modal di dalam negeri sehingga perusahaan milik negara termasuk di industri Teknik dan alat berat itu tidak bekerja secara optimal. Jika surplus modal dalam perusahaan milik negara bisa mengakibatkan kurangnya insentif untuk mencapai efisiensi dan kinerja optimal. Perusahaan milik negara ini tidak merasa perlu untuk meningkatkan efisiensi operasional atau inovasi dalam rangka bersaing. Selain itu, kalau perusahaan milik negara China ini tidak bekerja optimal, pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan untuk negara akan menurun. Hal ini bisa mempengaruhi pendapatan negara dan

menyebabkan defisit anggaran. Melihat kondisi ini, pemerintah China tentu memutar otak agar perusahaan yang kurang bekerja secara optimal dialihkan ke proyek luar negeri yang menguntungkan negara (Lin et al., 2020). Oleh karena itu, China memutuskan untuk memanfaatkan perusahaan konstruksi milik negara untuk terlibat dalam proyek BRI di Kamerun.

Seperti yang ditemukan sebelumnya bahwa penyerapan perusahaan konstruksi milik negara China dalam program BRI di Kamerun telah meningkatkan margin keuntungan mereka. Perusahaan yang bekerja tidak akan mati dan disfungsi, sekaligus China akan mendapatkan profit ekonomi dari perusahaan-perusahaan konstruksi tersebut. Berbeda halnya jika perusahaan konstruksi yang bekerja untuk program BRI itu berasal dari negara peminjam, maka China tidak akan mendapatkan margin keuntungan yang mengalir ke dana negara sebab China tidak memiliki hak di situ. Penggunaan perusahaan konstruksi milik negara oleh China di program BRI ini menjadi siasat yang menguntungkan China sekaligus merugikan negara peminjam. Permasalahannya adalah perusahaan konstruksi China itu dibayar menggunakan dana pinjaman negara peminjam yang diberikan China itu sendiri.

4.2 Meningkatkan Perdagangan Bilateral

Kepentingan ekonomi China dari program BRI nya di Kamerun adalah meningkatkan perdagangan bilateral. Bukti dari argument ini dapat dilihat dari laporan dari Direktur Jenderal Tresor tahun 2018, kerjasama antara Kamerun dan China melalui berbagai kontrak telah mendorong China menjadi penyedia utama bagi Kamerun sejak 2013. Kuantitas barang yang Kamerun impor dari China melampaui angka 1 miliar USD pada tahun 2016, jumlah ini mencapai lebih dari seperlima dari total impor, hampir dua kali lipat lebih besar dari jumlah pada tahun 2010 (Gael & Yu, 2020).

Namun, situasinya berbeda dalam hal ekspor. Cina hanya menempati peringkat kelima sebagai mitra perdagangan terbesar Kamerun dengan total nilai ekspor sekitar 150 juta USD pada tahun 2016, memberikan kontribusi sekitar 7% terhadap total ekspor negara tersebut. Skema perdagangan ini jelas tidak seimbang dan lebih menguntungkan bagi Cina. Poin utama impor Cina terfokus pada bahan mentah, mencakup dua pertiga dari kayu, kapas, dan kakao. Di sisi lain, ekspor utama Cina mencakup perangkat elektronik seperti telepon, televisi, dan panel surya, juga bahan besi seperti batangan dan produk gulung, serta perangkat mekanis seperti turbin hidrolik (N'Gono Welcome Gael & Haiming Yu, 2019:834).

Main products exported to China	Value (in Millions USD)	Main products imported from China	Value (in Millions USD)
Wood, charcoal, wooden articles	106	Electrical appliances and materials	300
Cotton	38	Cast iron, iron and steel	121
Cocoa	3	Articles of cast iron, iron or steel	109
Copper	1	Machinery, mechanical apparatus and machines	63
Total of exports	151	Total of imports	1046

Source: International trade center

Gambar 4.1 Data Perdagangan Produk Utama antara Kamerun dan China pada tahun 2016

Seperti yang telah disebutkan di atas, proyek BRI China di Kamerun tidak hanya berpengaruh terhadap pembangunan di Kamerun melainkan juga berpengaruh terhadap volume perdagangan bilateral antar dua negara ini. Akan tetapi, seperti yang dapat dilihat pada data di atas, volume perdagangan bilateral China dan Kamerun ini kontras. Untuk beberapa produk yang paling banyak diperdagangkan saja, angka ekspor barang Kamerun ke China jauh lebih sedikit dibandingkan angka impor produk dari China yang masuk ke Kamerun. Kamerun paling banyak mengekspor kayu, arang, dan bagian kayu lainnya ke China dengan nilai 106 juta USD. Jika dibandingkan dengan produk yang paling banyak diterima Kamerun dari China yaitu perangkat elektronik dan material, itu hamper 3x lipat lebih banyak. China mengimpor peralatan elektronik ke Kamerun dengan nilai 300 juta USD. Ekspor Kamerun ke China untuk produk kapas, coklat, dan copper pun hanya bernilai 38 juta USD, 3 juta USD, dan 1 juta USD berturut-turut. Sedangkan, China berhasil memasukkan barangnya ke Kamerun seperti besi dan nikel, bahan mentah besi dan nikel, dan perangkat mesin dengan nilai hingga 121 juta USD, 109 juta USD, dan 63 juta USD secara berturut-turut. Data ini menunjukkan bagaimana hubungan perdagangan bilateral yang terjadi akibat proyek BRI China di Kamerun itu sebenarnya lebih menguntungkan pihak China. Kamerun tidak mendapatkan dampak yang begitu signifikan dari adanya hubungan ini.

Argumen dan bukti di atas mendukung teori kepentingan nasional Plano & Olton bahwa kebijakan luar negeri suatu negara itu dilangsungkan untuk memenuhi kebutuhan esensial negara tersebut. Salah satu kebutuhan esensial suatu negara adalah ekonomi yang positif. Ekonomi yang positif itu sendiri bisa dicapai melalui berbagai cara termasuk dengan ekspansi perdagangan. Dalam kasus ini, China berhasil meningkatkan volume perdagangan luar negerinya dengan Kamerun setelah adanya proyek BRI. Nilai ekspor China ke Kamerun untuk beberapa komoditas terhitung sangat tinggi dibandingkan nilai ekspor Kamerun ke China. Hubungan

perdagangan bilateral diantara dua negara akibat proyek BRI ini jelas menguntungkan China. Dengan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa proyek BRI ini tidak hanya membawa China mendapatkan keuntungan dari pembayaran utang melainkan juga keuntungan dari perdagangan bilateral yang semakin lancar setelah adanya proyek BRI.

Tidak hanya dalam perdagangan bilateral, kehadiran China di Kamerun juga tercermin melalui sejumlah perusahaan yang terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur besar atau mendominasi sektor-sektor yang strategis. Misalnya, perusahaan minyak Addax Petroleum (afiliasi dari raksasa Sinopec) menjadi produsen minyak mentah kedua terbesar di Kamerun dengan pangsa pasar sekitar 30%, sedangkan China Harbour Engineering Corporation (CHEC) menjadi pelaku utama dalam proyek pembangunan pelabuhan Kribi dan terminal peti kemas dalam konsorsium dengan Bolloré Africa Logistics dan CMA-CGM sejak tahun 2015. Menurut sensus terbaru dari Institut Statistik Nasional pada tahun 2018, terdapat 172 perusahaan asal China yang beroperasi di Kamerun, menjadikan China sebagai negara non-benua dengan jumlah perusahaan terbanyak di Kamerun (Gael & Yu, 2020)

4.3 Kebutuhan Lapangan Kerja bagi Pekerja China di Kamerun

Isu terakhir yang menjadi fokus adalah situasi ketenagakerjaan China yang ada di benua Afrika. Data yang disajikan dalam tabel di bawah ini berasal dari sumber resmi pemerintah Tiongkok dan mengilustrasikan jumlah pekerja yang terlibat dalam beragam proyek konstruksi dan sektor ketenagakerjaan di berbagai negara Afrika. Data ini mencakup rentang waktu 2015-2017 dan 2012-2014. Terdapat variasi yang mencolok dalam angka ini, menunjukkan bahwa hubungan antara utang pembangunan infrastruktur dari China dan jumlah pekerja China di Afrika tidak dapat dijelaskan secara sederhana sebagai korelasi yang jelas.

Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam proyek BRI di Afrika dipengaruhi oleh beragam faktor, termasuk regulasi hukum di negara

peminjam serta kondisi pasar tenaga kerja lokal. Sebagai contoh, sebelumnya program pembangunan infrastruktur di Angola melibatkan sekitar 48.000 pekerja China dalam periode sebelumnya, namun jumlah tersebut menurun menjadi sekitar 33.000 dalam periode yang lebih terbaru. Angka ini mencatat rekor tertinggi di antara negara-negara peminjam lainnya. Sementara itu, negara-negara peminjam besar seperti Mesir dan Afrika Selatan melaporkan keterlibatan pekerja China yang minim. Negara-negara seperti Kenya, Zambia, dan Ethiopia memiliki jumlah pekerja Tiongkok yang berkisar sekitar 10.000 pekerja.

TABLE 2: CHINESE WORKERS IN AFRICA

Country	2012-14	2015-17
Angola	48,120	33,034
Kenya	3,430	8,099
South Africa	3,436	968
Egypt	740	1,899
Zambia	6,659	7,311
Cameroon	2,798	3,585
Republic of Congo	10,120	6,711
Uganda	1,737	4,529
Ethiopia	9,630	9,840
Nigeria	8,057	9,257
Average	9,473	8,523
Rest of Africa	2,707	3,107

Source: Johns Hopkins SAIS China-Africa Research Initiative Database.¹⁸

Gambar 4.2 Data Pekerja China di Afrika tahun 2012-2017

Sumber: John Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS), 2019 (<http://www.sais-cari.org/s/LaborData.xlsx>)

Berdasarkan gambar 4.2, kita memperoleh informasi bahwa negara-negara Afrika yang bekerja sama dengan proyek BRI China itu menggunakan tenaga kerja asing dari China untuk pengerjaan proyek, termasuk Kamerun. Dari gambar di atas, jumlah pekerja China di Kamerun yang bekerja di bawah proyek BRI terus mengalami peningkatan sejak tahun 2012 hingga 2017. Pada periode 2012-2014, total pekerja China yang diimpor ke Kamerun untuk proyek BRI sebanyak 2.798 pekerja. Angka ini terus naik di tiga tahun berikutnya yaitu di tahun 2015-2017. Pekerja China di negara tersebut mencapai angka 3.585 atau naik sebanyak 1.000 pekerja dalam kurun waktu tiga tahun. Meskipun angka ini tidak sebesar negara Afrika lain seperti Angola, Kongo, dan Ethiopia, namun jumlah pekerja China di Kamerun menunjukkan tren peningkatan. Artinya, perusahaan China yang bekerja untuk proyek infrastruktur Kamerun itu terus merekrut pekerja China dari tahun ke tahun.

Dalam konteks proyek-proyek BRI China, pemerintah serta penduduk negara tuan rumah telah berupaya meningkatkan andil pekerja lokal dalam melaksanakan proyek tersebut, tujuannya adalah untuk mendukung peningkatan pendapatan lokal dan transfer keterampilan. Namun, perusahaan-perusahaan asal China, yang terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek ini, cenderung berusaha menekan biaya tenaga kerja, sambil mencari cara untuk mematuhi preferensi politik Beijing. Dampaknya sering kali menyebabkan impor tenaga kerja dari China untuk terlibat dalam proyek-proyek BRI, alih-alih mengutamakan pekerja lokal.

Dalam kasus posisi dengan keterampilan tinggi, perusahaan-perusahaan China mungkin percaya bahwa pasaran tenaga kerja lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka atau menganggap lebih mudah untuk mentransfer karyawan yang sudah ada daripada merekrut pekerja lokal. Mempekerjakan tenaga kerja China dalam proyek-proyek semacam ini bisa memungkinkan perusahaan menghindari kerumitan rezim hukum yang mungkin lebih menguntungkan bagi pekerja lokal daripada bagi perusahaan multinasional asing dalam konteks perselisihan

buruh. Ada juga pendapat bahwa buruh China cenderung lebih produktif dibandingkan dengan pekerja lokal. Sebagai contoh, Presiden Kamar Industri Konstruksi di Sri Lanka pernah menyatakan bahwa pekerja asal China memiliki produktivitas empat kali lipat lebih tinggi daripada pekerja Sri Lanka. Investasi yang memiliki dimensi sensitif politik juga mungkin melibatkan lebih banyak pekerja asal China, terutama menjelang akhir tahapan proyek, karena Beijing mendorong perusahaan-perusahaan untuk memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan (Hillman & Trippett, 2021).

Sementara itu, dalam posisi berketerampilan rendah, pemilihan untuk mengimpor tenaga kerja China sebagian terjadi akibat kerentanannya yang lebih tinggi. Praktik-praktik seperti penyitaan paspor, pemotongan upah, dan isolasi dalam perumahan milik perusahaan, menciptakan risiko penurunan dan meminimalkan potensi gangguan oleh kerusuhan buruh. Agen-agen yang beroperasi di China sering kali merekrut pekerja dengan menyesatkan mereka tentang kondisi kerja dan upah yang akan diterima. Setelah tiba di negara tuan rumah, pekerja ini sering kali terjebak dan tidak bisa kembali ke negara asal mereka. Sebagai contoh, survei terhadap pekerja konstruksi asal China di Kamboja mengungkapkan bahwa lima puluh tujuh persen dari responden mengakui bahwa majikan mereka memegang paspor mereka. Namun, praktik kerja semacam ini bervariasi dari sektor ke sektor dan dari perusahaan ke perusahaan, dan buruh migran China kadang-kadang mengalami kondisi kerja yang tidak manusiawi, yang bahkan melanggar regulasi yang diterapkan oleh pemerintah China untuk mengatur tenaga kerja yang bekerja di luar negeri.

Beberapa pengamat politik juga mengatakan bahwa program BRI China di negara penerima termasuk di Kamerun menciptakan persaingan yang lebih intensif dengan produk-produk Cina yang lebih murah serta masuknya tenaga kerja Cina dapat mengganggu bisnis-bisnis lokal yang mungkin kesulitan bersaing dalam hal harga dan skala produksi. Penyesuaian strategi bisnis dan pertimbangan ulang taktik menjadi

penting bagi pelaku bisnis lokal guna menjaga daya saing mereka dalam menghadapi arus barang dan tenaga kerja yang berasal dari China (Weng et al., 2021). Dari temuan ini, kita memperoleh informasi bahwa Pemerintah China memang memiliki intensi untuk memanfaatkan pekerja lokalnya untuk bekerja di proyek pembangunan di negara penerimanya termasuk di Kamerun. Perhatian masyarakat global tentang strategi China yang satu ini sudah cukup menunjukkan bahwa program BRI memang dijadikan China sebagai cara untuk memproduksi pekerja lokalnya dibandingkan pekerja dari negara peminjam.

Dari argumen dan temuan di atas sudah mendukung teori kebijakan luar negeri Lentner bahwa negara dalam memutuskan kebijakan luar negeri harus mempertimbangkan dua faktor sekaligus, yaitu faktor system internasional dan faktor domestik. Negara tidak bisa berat kepada salah satu faktor dalam menentukan kebijakan luar negerinya sehingga semua faktor memiliki nilai yang sama penting untuk sebuah negara. Dalam konteks ini, China mempertimbangkan kondisi sumber daya manusia yang ada di dalam negerinya untuk mengeluarkan kebijakan BRI. China yang memiliki jumlah penduduk yang banyak membuat China juga memiliki Angkatan kerja yang banyak. Pekerja-pekerja ini dimanfaatkan Pemerintah China untuk bekerja di luar negeri dalam rangkaian program BRI. Dengan itu, pekerja China semakin minim yang mengganggu sekaligus negara akan mendapatkan pajak atas pendapatan pekerja China yang bekerja di program BRI termasuk di Kamerun.

4.4 Reformasi pada Badan Usaha Milik Negara China

Reformasi Badan Usaha Milik Negara menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Xi Jinping. Secara ekonomi, China bertujuan untuk mengurangi hambatan pertumbuhan domestik dan meningkatkan daya saing global dari perusahaan milik negara terbesarnya, yang dikenal sebagai *yangqi*. Perusahaan besar milik negara China telah lama mengalami penurunan kinerja, peningkatan utang, dan masalah korupsi

yang serius. Dari segi politik, Partai Komunis China berkeinginan memperkuat kepemilikan negara sebagai pilar stabilitas dalam negeri dan meningkatkan pengaruhnya di luar negeri. Untuk mencapai tujuan ini, pada September 2015, China akhirnya merilis "Panduan Opini Partai Komunis Tiongkok Komite Pusat dan Dewan Negara Pendalaman Reformasi Perusahaan Milik Negara", yang diikuti oleh serangkaian kebijakan rinci (Leutert, 2016).

Merombak perusahaan milik negara merupakan langkah yang tidak hanya didasarkan pada keputusan sewenang-wenang, tetapi juga terencana secara sistematis dengan pertimbangan yang matang. China telah menjelaskan bahwa tujuan-tujuan yang mereka tetapkan dalam proses ini memiliki dasar yang masuk akal dan berwibawa. Salah satu tujuan utama dari reformasi perusahaan milik negara yang diumumkan oleh China adalah untuk melakukan pemisahan antara kepemilikan dan manajemen. Dengan memisahkan kedua aspek ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem yang lebih transparan dan efisien. Ini dapat membantu menghindari benturan kepentingan yang mungkin muncul ketika aspek kepemilikan dan pengambilan keputusan operasional tercampur aduk. Dengan kata lain, hal ini akan memungkinkan manajemen perusahaan milik negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang lebih obyektif dan berdasarkan kondisi pasar serta kebutuhan strategis perusahaan (Borst, 2021).

Selain itu, dengan mengurangi campur tangan dalam operasi harian perusahaan milik negara, pemerintah China ingin memberikan ruang lebih besar bagi manajemen internal perusahaan. Langkah ini mencerminkan dorongan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih mandiri dan kreatif. Dengan kebijakan ini, diharapkan manajemen perusahaan milik negara dapat berinovasi, menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, dan mengambil keputusan yang lebih cepat dan responsif. Selanjutnya, pemerintah China memberikan kesempatan bagi perusahaan milik negara khususnya di sector strategis untuk tidak hanya

menjadi entitas yang bergantung pada dukungan pemerintah semata, tetapi juga mampu menghasilkan nilai dan bersaing secara efektif dengan perusahaan swasta dan internasional (Borst, 2021).

Dalam kebijakan ini, China melakukan restrukturisasi perusahaan negara berdasarkan fungsinya, mengkonsolidasikan aset mereka, serta mengembangkan kepemilikan campuran. Otoritas negara terhadap manajemen Langkah transformasi mendasar terjadi dengan membagi BUMN menjadi kelas publik (*gongyilei*) dan kelas komersial (*shangyilei*). Perusahaan milik negara kelas public atau *gongyilei* dijalankan dengan tujuan kesejahteraan public, sedangkan perusahaan kelas komersial atau *shangyilei* dioperasikan untuk tujuan mencari keuntungan atau laba.. Meskipun China berusaha meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan kemampuan inovasi perusahaan milik negaranya, profitabilitas tetap menjadi prioritas sekunder bagi yang bertanggung jawab atas fungsi publik atau keamanan nasional (Leutert, 2016).

Atas kondisi reformasi pada perusahaan milik negara ini, Pemerintah China memacu produktifitas perusahaan milik negara untuk berkontribusi pada proyek pembangunan BRI di luar negeri. Perusahaan milik negara China memiliki posisi kunci dalam implementasi program BRI dan bermain peran sentral dalam pelaksanaannya. Hingga Oktober 2018, perusahaan milik negara China telah berhasil mengakuisisi sekitar setengah dari total proyek BRI berdasarkan jumlah proyek, serta lebih dari 70% berdasarkan nilai proyek. Oleh karena itu, melihat BRI dari perspektif perusahaan milik negara adalah sangat relevan. Tujuan strategis BRI adalah untuk menciptakan lingkungan internasional yang mendukung upaya menggalakkan pembangunan ekonomi China (Zhan & Yin, 2019).

Dari argument dan bukti di atas sudah mendukung teori kebijakan luar negeri Lentner bahwa negara mempertimbangkan determinan domestik untuk membentuk sebuah kebijakan luar negerinya. Dalam hal ini, determinan domestik yang dipertimbangkan China adalah kondisi ekonomi domestiknya. Perusahaan milik negara China harus bekerja

secara lebih produktif lagi dengan cara memperluas jaringan dan pasar mereka di luar negeri salah satunya dengan terlibat dalam tender pembangunan infrastruktur BRI di luar negeri. Tidak heran bahwa 70% proyek BRI itu dipegang oleh perusahaan milik negara China karena Pemerintah China memang meniatkan hal tersebut demi kelangsungan perusahaan milik negaranya.

4.5 Membangun Basis Militer Luar Negeri

Pada awalnya, kepentingan militer dan pertahanan China di daratan Afrika itu hanya sebatas ingin melindungi warga negara dan aset-aset negaranya yang ada di sana. Namun, arah kepentingan itu berubah sejak pendirian satu pangkalan militer di Djibouti pada tahun 2017. Pembangunan pangkalan militer itu dianggap sebagai langkah awal krusial dalam ambisi militer global China dan juga mencerminkan pendekatan yang semakin canggih yang diadopsi oleh China dalam mencapai tujuan tersebut. China selalu menghadapi tantangan dalam mewujudkan keinginannya untuk memiliki kehadiran militer di luar negeri, terutama sebagai negara yang menganut ideologi "non-intervensi" dalam urusan ekstra kedaulatan dan ketidakselarasan. Oleh karena itu, China mencari legitimasi melalui mandat Dewan Keamanan PBB untuk misi penjaga perdamaian, yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan negara tuan rumah. Pada tahun 2008, China memulai misi pengawasan angkatan laut di Teluk Aden sebagai respons terhadap serangkaian resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberikan wewenang kepada negara-negara untuk melakukan operasi pemberantasan pembajakan di wilayah tersebut. Misi ini memberikan dasar bagi Tiongkok untuk mengklaim bahwa mereka membutuhkan pusat logistik untuk memberikan dukungan dan pasokan bagi pasukan mereka di negara-negara Afrika (Inhofe et al., 2018:8).

Pembangunan pangkalan militer pertamanya di daratan Afrika ini menjadi tanda kepentingan China dari aspek militer dan pertahanan. Hal

ini seperti yang dikatakan Kongres AS bahwa China tengah mencari lokasi yang lebih jauh ke selatan di sepanjang pesisir timur Afrika, khususnya di Tanzania, dan memiliki rencana yang lebih ambisius sepanjang garis pantai Atlantik Afrika. China memiliki ambisi yang lebih besar daripada sekadar mencari tempat untuk berlabuh dan memperoleh pasokan bahan bakar dan makanan. Mereka sudah mengarah kepada pembangunan kekuatan militer luar negeri di semua benua (VOA, 2021).

Hal ini dibuktikan dengan pembangunan Pelabuhan Kribi yang diidentifikasi sebagai lokasi potensial untuk pangkalan Angkatan Laut China. Apalagi China memang sudah menyatakan ambisinya untuk meningkatkan pangkalan militer luar negerinya sejak awal tahun 2000-an (Griffiths, 2023). Ketika China hadir dengan proyek BRI di Afrika, ini sudah menjadi tanda bahwa ambisi tersebut perlahan direalisasi China di bawah bayang-bayang proyek pembangunan. Meskipun China membantah ambisi tersebut, namun yang terjadi di Kamerun khususnya di Pelabuhan Kribi nyatanya seperti itu. China memberi dana pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Kribi yang pada akhirnya bermuara kepada dominasi kekuatan.

Argumen di atas mendukung teori kebijakan luar negeri Howard Lentner yang menyatakan bahwa suatu negara memiliki tujuan yang dituangkan dalam kebijakan luar negerinya. Tujuannya bisa berupa tujuan ekonomi, tujuan pertahanan, tujuan militer, atau tujuan diplomasi. Dilihat dari argument di atas, tujuan negara China tidak hanya mencakup tujuan ekonomi melainkan juga tujuan militer dan pertahanan. China berambisi untuk membentuk basis militernya di luar negeri untuk memperkuat pertahanan globalnya. Oleh karena itu, China mulai membangun Pelabuhan-pelabuhan besar di benua Afrika sejak tahun 2017 di Djibouti. Kini berlanjut di Kamerun dengan proyek Pelabuhan Kribi yang didanai penuh oleh BRI hingga peroperasiannya. Hal ini terindikasi sebagai upaya

China membentuk Angkatan militer luar negerinya sebab pembangunan dan pengoperasiannya didanai penuh oleh China.

Kedatangan China ke Kamerun tentu didorong oleh beberapa determinan. Pertama, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kamerun. Negara ini mempunyai kekayaan besi, aluminium, minyak, dan gas alam sehingga China semakin berambisi untuk mengeksplorasi sumber daya tersebut demi keuntungan pribadi. Melihat kekayaan sumber daya yang melimpah, China akhirnya dengan segera menjalankan proyek BRI di Kamerun yang dimulai dengan pembangunan Pelabuhan. Dengan adanya proyek BRI di Kamerun, China akan semakin mudah mengekstraksi sumber daya Kamerun seperti perusahaan minyak Yang Chang Logone Development milik China yang memiliki kontrak pembagian produksi minyak senilai 62 juta Dolar Amerika dengan perusahaan minyak milik Kamerun (Tiezzi, 2015). Inilah yang menjadi determinan internasional China untuk datang ke Kamerun menerapkan proyek BRI nya. Sumber daya alam yang melimpah milik Kamerun mendorong China untuk datang ke Kamerun menerapkan BRI agar eksplorasi sumber daya alamnya bisa lebih lancar dan dimudahkan.

Determinan internasional lain yang membuat China masuk ke Kamerun dan Afrika secara umum adalah China yang sangat bergantung pada dukungan diplomatik dan dukungan finansial dari negara-negara di Afrika termasuk Kamerun terkait dengan isu-isu kunci dalam politik internasional dan forum multilateral. Dalam konteks ambisi global yang tumbuh pesat di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, China semakin tertarik untuk menggambarkan Afrika sebagai pendukung yang kuat, menunjukkan statusnya sebagai kekuatan besar yang bertanggung jawab, dan memimpin blok negara berkembang. Keterlibatan ekonomi China melalui proyek BRI di Afrika sering dianggap sebagai tanda kemurahan hati negara berkembang terbesar ini dan aspirasinya untuk

menciptakan tatanan dunia baru yang dipimpin oleh Tiongkok. Semua ini meningkatkan citra dan pengaruh Xi Jinping di dalam dan luar negeri (Inhofe et al., 2018:3).

Di samping determinan internasional, kedatangan China ke Kamerun juga didorong oleh determinan domestik China berupa ideologi. Dari segi ideologi, China secara aktif mempromosikan model pembangunannya yang menggabungkan otoritarianisme dan kapitalisme kepada elit Afrika melalui program beasiswa pemerintah dan pelatihan. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman kepada para elit Afrika tentang pengalaman China dalam pengembangan ekonomi dan tata kelola politik, dengan harapan mereka akan menerapkan kebijakan serupa di negara asal mereka. Pendekatan ideologis ini memerlukan investasi besar dalam hal sumber daya geografis dan pendekatan institusional yang sistematis, dan memiliki dampak yang signifikan secara psikologis dan politik terhadap keputusan dan preferensi elit Afrika, yang kaitannya dengan dinamika politik di seluruh benua Afrika (Inhofe et al., 2018:4).